

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ASCE di Amerika Serikat (1998), telah mempublikasikan beberapa laporan struktur dan sejumlah laporan status yang dimutakhirkan datanya sehingga berpotensi untuk memberi solusi dalam peningkatan infrastruktur pada masa yang akan datang. Laporan infrastruktur tersebut telah disitasi dalam berbagai tulisan artikel dan laporan studi akademik, pemimpin politik telah memanfaatkan untuk membuat kebijakan dalam pengadaan infrastruktur di negara bagiannya. Dalam mengembangkan infrastruktur di negaranya, ASCE telah membentuk panel pakar yang terdiri dari berbagai bidang konstentrasi infrastruktur yang memiliki reputasi nasional untuk menentukan lingkup dan penilaian, juga anggaran yang dibutuhkan. Hal yang sama sudah terjadi di Australia tahun 2001 yang mulai menggunakan model Amerika Serikat untuk membuat penilai infrastruktur di Australia.

Laporan infrastruktur *Fragile Foundation: A Report on America's Public Works* (1998), melaporkan isu yang merekomendasi bagaimana negara meningkatkan kemampuan infrastrukturnya dalam melayani kegiatan masyarakat. Untuk memandu studi tersebut, para penulis laporan tersebut menyusun *baseline* untuk mengevaluasi infrastruktur yang terdiri dari delapan kategori infrastruktur dengan memuat tingkatan penilaian berdasarkan kinerja dan kapasitas infrastruktur yang ada. Pada tahun 1988, rata-rata nilai infrastruktur masih pada tingkatan C, yang artinya menunjukkan pencapaian berada pada tingkatan cukup. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kemacetan lalu lintas dan kemampuan dalam pemeliharaan untuk menghadapi umur infrastruktur yang semakin tua. Sehingga para anggota komisi mengusulkan investasi fiskal yang dapat menunjang biaya operasi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Sejak dikeluarkannya laporan infrastruktur pada tahun 1988, studi ASCE selanjutnya menunjukkan bahwa pada dekade berikutnya nilai infrastruktur di Amerika semakin parah dan tingkat nilai berkurang rata-ratanya. Berkurangnya tingkatan nilai rata-rata disebabkan oleh menurunnya nilai infrastruktur sekolah, penyedia air bersih, jalan, dan dam. Nilai tersebut mengejutkan anggota komisi, banyak praktisi dan pengamat dari anggota masyarakat yang peduli pada infrastruktur. Sedangkan tahun 2001, menunjukkan adanya peningkatan ke nilai D+, namun pada tahun 2005 kembali turun ke D. Hasil laporan tersebut diketahui bahwa terjadi hal yang sama pada laporan awal di tahun 1988 yaitu masalah pemeliharaan dan ketidakmampuan penyediaan dana dalam proses pengembangan infrastruktur sehingga ASCE mengusulkan biaya sebesar triliunan dollar untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur beserta pemeliharaannya agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. meskipun disadari kecukupan infrastruktur akan membantu aktifitas usaha pembangunan ekonomi masyarakat

Indonesia International Infrastructure and Exhibition 2012 (IIICE2012), memberikan pandangan yang kritis untuk industri infrastruktur seperti energi pembangkit daya dan distribusi, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi jalan, udara, laut dan air serta dan Manajemen air dan limbah. Penilai kelayakan infrastruktur merupakan suatu program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di negaranya.

infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh, kegiatan perekonomian penduduk suatu wilayah mungkin dapat ditampung pada ruang-ruang 2 yang berupa sarana perekonomian, seperti kawasan perdagangan, jasa, dan industri yang dimiliki oleh wilayah tersebut, tetapi tanpa dukungan penyediaan jaringan infrastruktur yang baik, sebagai contoh seperti jaringan jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, dan sanitasi, kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang

didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut, yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button, 2002 dalam Hadi Wahyono,2006).

Di Indonesia studi ini belum pernah dilakukan dalam pemerintahan SBY meskipun sudah membentuk MP3 AI untuk pengembangan daerah tertinggal namun prakiraan kebutuhan infrastruktur dan biayanya belum diketahui secara pasti sehingga dapat menimbulkan banyak masalah. Menurut Catanesey, Anthony J., dan Jamse C.S(1979:120) dalam bukunya Perencanaan Kota, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungan yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharannya.

Sebagai provinsi yang sedang berkembang dan merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia, penilaian infrastruktur yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sangatlah penting. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengetahui kelayakan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan sosial di Provinsi Kepulauan Riau.

1.3 Tujuan

Menilai sampai sejauh mana kelayakan infrastruktur menurut para insinyur teknik sipil dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau serta memberikan informasi biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan pada masa mendatang.

1.4 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi : pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, jembatan dan jalan (nasional, provinsi dan kabupaten), air minum, telekomunikasi, listrik di Provinsi Kepulauan Riau

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya.
2. Sebagai tolok ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.